

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan perkembangan bisnis yang mulai berkembang memicu minat masyarakat untuk melakukan usaha mandiri, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah yang biasa disebut UMKM, merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam memajukan perekonomian Indonesia dan mengurangi tingkat kemiskinan. Karena dengan adanya UMKM peluang kesempatan kerja untuk para pengangguran meningkat, dengan demikian dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Terdapat 3 alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu (1) kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif, (2) sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi, (3) karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar (Berry 2001 dalam Rahayu 2005).

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen (Dinda Audriene Mutmainah, 2016).

UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis ekonomi. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 2008, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 2008 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Jumlah pelaku industri UMKM di Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016, hingga tahun 2017.

Fakta yang ada dalam mengembangkan UMKM juga terdapat beberapa masalah. Masalah yang mempunyai bagian yang cukup besar yaitu masalah teknologi, modal, dan keahlian manajerial (Soetrisno, 2015). Fenomena yang terjadi pada UMKM di Kota Tangerang susahny mendapatkan akses modal dan perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Masalah permodalan masih menjadi

masalah utama dalam perkembangan UMKM di Kota Tangerang. Permodalan yang tidak mendapat pengawasan ketat menjadi permasalahan inti (Nidia Zuraya, 2017). Sehingga pengembangan usaha UMKM mengalami perlambatan pertumbuhan. Selain itu para pelaku UMKM di Kota Tangerang mengaku kesulitan dalam mendapatkan perizinan usaha. Dampaknya, banyak pelaku UMKM yang gulung tikar akibat sulitnya mendapatkan modal dan surat perizinan usaha.

Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Akibatnya, UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk- produk yang mampu bersaing. Bahkan sebagian dari UMKM masih belum tersentuh lembaga keuangan (bank), sehingga banyak juga dari UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban dan resiko yang cukup berat (Nelsi, 2017).

Pada kenyataannya, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ke beberapa UMKM di daerah Perum Tangerang fenomena selanjutnya yang terjadi adalah rendahnya dalam pencatatan usaha, merupakan kelemahan yang melekat pada sebagian besar pengusaha kecil. Para pelaku UMKM tidak membiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasinya yang tersusun secara sistematis. Laporan keuangan juga berguna bagi pemilik untuk

dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan usahanya.

Kebanyakan UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan di jual, serta jumlah piutang dan utang. Namun pencatatan tersebut hanya sebatas mengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak penyalur dana (bank).

Dalam PSAK No 1 (2009) tentang penyajian laporan keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Pinasti (2007) memaparkan bahwa informasi akuntansi ini dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan- keputusan dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga, dan lain- lain. Selain itu juga pengelolaan keuangan perlu diperhatikan. Hal ini diperlukan guna dapat memisahkan keuangan untuk keperluan pribadi dan keuangan untuk keperluan usaha.

Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan keuangan (Warsono, 2009). Namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah

hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009). Ada juga beberapa keterbatasan lain yang dihadapi oleh UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi. Antara lain kurangnya disiplin namun rajin dalam melakukan pembukuan karena latar pendidikan yang tidak mengenal akuntansi, hingga tidak adanya dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan dalam pencatatan akuntansi (Rudiantoro dan Siregar, 2011).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang merupakan adopsi dari *International Financial Reporting System (IFRS) for small and medium enterprise*. SAK ETAP tersebut berlaku pada tahun 2011. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK umum.

SAK ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar

menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturang yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Secara umum SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Selain adanya SAK ETAP tersebut, kemudahan lain bagi UMKM dalam hal pembukuan akuntansi adalah semakin banyaknya *software* akuntansi buatan dalam negeri maupun luar negeri yang telah secara khusus dirancang bagi UMKM seperti *Accurate* dan *Zahir*. Masa mendatang diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Robbins (2001) dalam Utaminingsih (2014), menyatakan persepsi adalah tindakan individu menafsirkan dan memberi arti terhadap lingkungan sosial. Seorang pelaku usaha seharusnya memiliki pandangan atau persepsi bahwa akuntansi memiliki banyak manfaat dalam dunia bisnis, diantaranya menyediakan informasi ekonomis suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan dan menggambarkan kondisi perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Kenyataannya masih banyak dijumpai dari pelaku usaha

kecil yang merasa bahwa usaha yang dilakukan masih terlalu kecil dan kerumitan yang selalu ada, serta kesulitan dalam mempelajari ilmu akuntansi.

Pemberian informasi dan sosialisasi merupakan sebuah metode/cara untuk mengenalkan dan membantu pelaku UMKM dalam mengetahui dan memahami tentang SAK ETAP (Tuti dan Dwijayanti, 2014). Dengan adanya pemberian informasi kepada para pelaku UMKM akan membuat pelaku UMKM memiliki wawasan lebih mengenai laporan keuangan. Terbentuknya persepsi yang baik akan pentingnya informasi akuntansi tidak cukup, maka perlu adanya pelatihan akuntansi yang mendorong penggunaan informasi akuntansi bagi para pelaku UMKM. Jika para pelaku UMKM sering mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai laporan keuangan maka persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan akan semakin baik.

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data (Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi termasuk teknologi komputer untuk dapat memproses dan menyimpan informasi, dan juga sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi merupakan penggerak keberlangsungan usaha serta memegang peranan penting dalam suatu usaha bisnis, baik skala kecil, menengah maupun besar. Semakin paham akan teknologi informasi semakin baik juga persepsi mengenai pemahaman teknologi informasi dan semakin baik pengelolaan laporan keuangan usaha.

Menurut Beltian (2015), paham berarti pandai dan mengerti benar, yang berarti pemilik harus memiliki pemahaman akuntansi, berarti pemilik yang

pandai dan mengerti benar tentang ilmu akuntansi, karena laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari ilmu akuntansi, diperlukan juga sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Latar belakang pendidikan adalah jurusan atau bidang studi yang ditempuh oleh pelaku UMKM. Latar belakang pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi akan memiliki persepsi yang baik mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dibanding pelaku UMKM dengan latar belakang non ekonomi.

Lama usaha adalah lamanya suatu UMKM berdiri atau umur UMKM semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini (Murniati, 2002). Semakin lama usaha yang dijalankan akan semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. Semakin lama usaha yang dijalankan pelaku UMKM, persepsi mengenai laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP akan semakin baik.

Ukuran usaha menggambarkan besar kecilnya usaha yang dijalankan para pelaku UMKM. Semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, persepsi pelaku UMKM semakin memandang penting atau tidaknya kebutuhan untuk melakukan pelaporan keuangan. Sehingga ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar

terkait solusi untuk menghadapinya (Pinasti, 2001). Dengan demikian semakin besar usaha yang dijalankan pelaku UMKM, persepsi mengenai laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP akan semakin baik.

Motivasi dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui persepsi para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Kedepannya diharapkan para pelaku UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para penyalur dana untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Dengan demikian para pelaku UMKM harus memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi usahanya dalam menerapkan laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan juga harus belajar dari berbagai sumber yang mungkin bisa diterapkan dalam usaha yang dijalankan, agar usaha yang dijalankan lebih berkembang pesat dan bisa bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus Pada UMKM di Daerah Perum Tangerang).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam Kinerja Kewirausahaan (UMKM) , antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM dalam pembuatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP, karena SAK ETAP masih dianggap suatu hal yang sulit dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Sulitnya para pelaku UMKM dalam mendapatkan pinjaman modal dari penyalur dana (bank) maupun investor.
3. Terdapat hubungan antara pemberian informasi dan sosialisasi, pemahaman teknologi informasi, latar belakang pendidikan, lama usaha, dan ukuran usaha dan persepsi penyusunan laporan keuangan berstandar SAK ETAP.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya batasan masalah penelitian, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM pada penelitian ini dibatasi sebanyak 80 UMKM di daerah Perum Tangerang. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2018.
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi, pemahaman teknologi informasi, latar belakang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha dan persepsi penyusunan laporan keuangan SAK ETAP.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi, pemahaman teknologi informasi, latar belakang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha secara simultan atau bersama- sama terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang?
2. Apakah terdapat pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang?
3. Apakah terdapat pengaruh pemahaman teknologi informasi secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang?
4. Apakah terdapat pengaruh latar belakang pendidikan secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang?
5. Apakah terdapat pengaruh lama usaha secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang?
6. Apakah terdapat pengaruh ukuran usaha secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha secara simultan atau bersama- sama terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian informasi dan sosialisasi secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman teknologi informasi secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pendidikan secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis lama usaha secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran usaha secara parsial terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP di daerah Perum Tangerang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan terutama Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Bagi Para Pelaku UMKM di daerah Perum Tangerang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di daerah Perum Tangerang. Khususnya tentang pentingnya pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Agar pelaku UMKM dapat mempergunakan laporan keuangan berbasis SAK ETAP dalam pengambilan keputusan serta dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit kepada pihak bank.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu akuntansi, menambah wawasan dan menjadi salah satu tambahan referensi bagi rekan- rekan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan materi serta dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.